



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA RESES DI MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- P. GERINDRA
2.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
3.	H. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
4.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
5.	Dr. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
6.	Hj. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
7.	H. TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
8.	Drs. Y. JACKY ULI, M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
9.	H. HERU WIDODO, S.Psi.	ANGGOTA TIM / F-PKB
10.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., SCCS.	ANGGOTA TIM / F- P. DEMOKRAT
11.	Komjen (Purn.) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA TIM / F-PKS
12.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

#### IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 7-11 Agustus 2023 di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
4. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
7. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

#### B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

##### I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

###### a. Bidang Anggaran

###### 1. Pagu Awal dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	1.105.832.421.000	622.540.360.902	56,30	483.292.060.098	43,70
2	Belanja Barang	665.882.524.000	282.498.751.543	42,42	383.383.772.457	57,58
3	Belanja Modal	38.129.412.000	12.297.196.591	32,25	25.832.215.409	67,75
<b>Total</b>		<b>1.809.844.357.000</b>	<b>917.336.309.036</b>	<b>50,69</b>	<b>892.508.047.964</b>	<b>49,31</b>

###### 2. Program Prioritas Tahun 2023

- a) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp170.228.000.
- b) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp667.100.000.
- c) Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri sebesar Rp21.302.586.000.
- d) Program Profesionalisme SDM Polri sebesar Rp92.775.000.
- e) Program Harkamtibmas sebesar Rp1.323.612.000.

###### 3. Target PNBPN Tahun 2023

Pada tahun 2023, Polda Sumatera Selatan memiliki target PNBPN sebesar Rp81.916.257.000 dan sebesar Rp196.284.310.000 target PNBPN khusus dari Mabes Polri.

###### 4. Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023

No	Satuan Kerja	Pembangunan
1	Polres Empat Lawang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 50 unit senilai Rp9.031.895.000</li><li>• Poliklinik Polres Empat Lawang Tipe 120 sebanyak 1 unit senilai Rp752.800.000</li></ul>
2	Polres Ogan Ilir	Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 10 unit senilai Rp2.211.231.000
3	Polres Pali	Rumah Dinas Tipe 38 sebanyak 60 unit senilai Rp10.059.460.000
4	Batalyon D Brimob Pali	Mako Batalyon D Brimob Pali berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Pali senilai Rp2.500.000.000
5	Komplek PAAKRI	Kolam renang Komplek PAAKRI berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Pali senilai Rp3.330.645.000

## 5. Usulan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

No	Satuan Kerja	Pembangunan
1	Batalyon C Brimob Belitang	Perumahan personel sebanyak 50 unit senilai Rp17.363.200.800
2	Polres Ogan Ilir	SPKT Polres Ogan Ilir senilai Rp1.974.465.000

## 6. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

- Aspol Pamen Polda Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Veteran.
- Peralatan penjinakan bahan peledak (JIBOM).
- Revisi anggaran Belanja Barang.
- Perbaikan rumah susun di PAAKRI.
- Perbaikan Wisma Kemala Bhayangkari.
- Tambahan revisi anggaran Belanja Modal TA 2024.

## 7. Pagu Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.148.926.275.000
2	Belanja Barang	1.046.536.306.000
3	Belanja Modal	109.678.128.000
<b>Total</b>		<b>2.305.140.709.000</b>

## 8. Target PNPB Tahun 2024

Polda Sumatera Selatan memiliki target PNPB sebesar Rp171.794.062.000.

### b. Bidang Pengawasan

#### 1. Tindak Pidana Khusus

##### a) Illegal Drilling dan BBM Ilegal

Tahun	Barang Bukti Minyak Bumi dan Olahan	Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
2021	22,957 ton	36	36	50
2022	177,181 ton	90	90	143
2023 (Jan-Jul)	555,407 ton	70	70	103

##### b) Illegal Mining

Tahun	Barang Bukti	Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
2021	- Excavator: 6 unit - Truk: 7 unit - Batubara: 32,35 ton	15	15	40
2022	- Excavator: 6 unit - Truk: 6 unit - Batubara: 20,58 ton	10	10	21
2023 (Jan-Jul)	- Truk: 15 unit - Batubara: 525 ton	33	28	40

## 2. Illegal Logging dan Illegal Fishing

Tahun	Kasus	Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
2021	<i>Illegal Logging</i>	4	3	4
	<i>Illegal Mining</i>	8	8	21
2022	<i>Illegal Logging</i>	9	8	9
	<i>Illegal Mining</i>	5	5	16
2023 (Jan-Jul)	<i>Illegal Logging</i>	1	0	2
	<i>Illegal Mining</i>	1	1	6

## 3. Kendala Penanganan Tindak Pidana Khusus

- Jaringan *illegal things* yang terorganisir sehingga membutuhkan penyelidikan mendalam.
- Keterlibatan aparat pemerintah seperti TNI/Polri.
- Lokasi tempat kejadian perkara yang jauh dan medan yang sulit dijangkau.
- Meningkatnya kebutuhan hidup dan kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dan dampak kegiatan *illegal things*.
- Lokasi penitipan barang bukti hasil *illegal things* yang terbatas dan kegiatan pemusnahan barang bukti dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- Belum adanya tindakan nyata dari Pemda untuk menyelesaikan kegiatan *illegal things*.

## 4. Tindak Pidana Umum

### a) Konflik Lahan

- Penggelapan hak atas barang tidak bergerak (Pasal 385 KUHP).
- Memasuki pekarangan tanpa izin (Pasal 167 KUHP).
- Pencurian (Pasal 363 KUHP).
- Menghalangi jalannya usaha perkebunan dan memanen secara tidak sah (Pasal 107 UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

### b) Kenakalan Remaja

Tindak pidana umum yang termasuk kenakalan remaja seperti balap liar, tawuran, begal, dan pemerasan/pungli.

## 5. Kendala Penanganan Tindak Pidana Umum

### a) Konflik Lahan

- Pelapor dan Terlapor memiliki hak yang sama, batas tanah belum jelas, tidak ada warkah dan saksi.
- Belum terdapat ketegasan dari Pemda terkait tapal batas desa/kecamatan/kabupaten.
- BPN membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan kebenaran administrasi.

### b) Kenakalan Remaja

Pelaku masih di bawah umur dan kerugiannya termasuk tindak pidana ringan, TKP sporadik dan waktu tidak tetap.

## 6. Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Pengembalian Kerugian Negara	Perkara	Tersangka	P21
2021	NIHIL	7	32	16
2022	Rp3.733.847.700	11	9	25
2023 (Jan-Jul)	Rp115.000.000	1	11	8

## 7. Tindak Pidana Narkotika

Tahun	Barang Bukti	Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
2021	- Sabu: 104.134,91 gram - Ganja: 267.085,80 gram - Ekstasi: 11.332 gram	2.029	1.664	2.658
2022	- Sabu: 121.707,07 gram - Ganja: 242.511,79 gram - Ekstasi: 14.157 gram	1.832	1.631	2.279
2023 (Jan-Jul)	- Sabu: 60.904,82 gram - Ganja: 137.296,26 gram - Ekstasi: 18.406 gram	1.089	779	1.411

## 8. Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara

Terdapat sekitar 700 lokasi penyulingan ilegal yang masing-masing lokasi melibatkan pekerja sebanyak 5 orang sehingga total pekerja sebanyak 3.500 orang. Pada masing-masing lokasi menghasilkan 2.000 liter per hari yang melebihi standar K3S dalam produksi minyak mentah nasional. Kegiatan tersebut dilakukan secara liar dan terdapat disparitas harga sehingga masyarakat lebih memilih menjual ke tempat penyulingan ilegal yang selanjutnya akan dioplos dengan minyak subsidi. Kegiatan ini merugikan negara sebesar Rp64,9 triliun dalam setahun.

## II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

### a. Bidang Anggaran

#### 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2022	204.089.691.000	202.546.820.355	99,24	1.542.870.645	0,76
2023 (Jan-Jul)	221.724.597.000	132.993.804.219	59,98	88.730.792.781	40,02

#### 2. Target PNBPN Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Target PNBPN (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2022	11.318.097.000	49.560.370.409	437,89
2023 (Jan-Jul)	12.650.060.000	18.738.021.417	148,13

### 3. Program Prioritas Tahun 2023

- a) Perkara Tindak Pidana Korupsi di bidang tambang, pajak, pertanian, perbankan, perkebunan, perizinan, dan PBJ.
- b) Restorative Justice (RJ).
- c) Pendampingan penyaluran dana BLT.
- d) Program Sumsel mandiri pangan dan pengendalian inflasi.

### 4. Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membutuhkan anggaran untuk penggunaan penyidikan lanjutan tindak pidana kehutanan, biaya Ahli, pengawasan orang asing, operasional pelaksanaan perintah direktif Presiden RI, tangkap buron, asset tracing, operasional Pemilu, serta pengamanan dan perawatan barang bukti.

### 5. Pagu Anggaran dan Target PNBPN Tahun 2024

Pagu anggaran dan target PNBPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp241.602.317.000 dan Rp13.000.000.000.

#### b. Bidang Pengawasan

1. Bidang Pidana Khusus: Perkara Tindak Pidana Korupsi di bidang pajak, tambang, serasi, PT Semen Baturaja, dan KONI.
2. Bidang Pidana Umum: Perkara terkait UU ITE, migas, Narkotika, kekerasan dan pencabulan pada anak di bawah umur, pembunuhan, kebakaran lahan perkebunan, pencurian, serta TPPO.
3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Perkara perdata Nomor 74/pdt.g/2023/pn.plg.
4. Upaya Membangun Sinergitas Koordinasi dan Kerja Sama
  - a) Mengadakan rapat bersama antara APIP, Kepolisian, dan BPKP terkait penanganan lapdu mengenai Tindak Pidana Korupsi.
  - b) Koordinasi/ekspos gabungan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
  - c) Koordinasi dengan penyidik TNI AL terkait Tindak Pidana Pelayaran, dengan BPKP terkait Penghitungan Kerugian Negara, dengan BPK terkait temuan LHP BPK, dan dengan penyidik/PPNS pajak terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi.
  - d) Mengikuti Rakernis Bidang Narkotika Pada Direktorat Darkoba Sumatera Selatan.
  - e) Diklat auditor kejaksaan se-Sumatera Selatan dengan Narasumber BPKP.
  - f) In House Training Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Pembaharuan KUHP.
  - g) Sosialisasi tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer ke Denpom II Sriwijaya se- Sumbagsel.
  - h) Mengadakan FGD Pidana Militer Tahun 2022 dan FGD Tindak Pidana Khusus di Bidang Pertambangan.
  - i) Koordinasi terkait Jaksa yang menangani Perkara Pemilu.

5. Implementasi Pengawasan Internal
  - a) Menjadi role model bagi bidang-bidang lain.
  - b) Memberikan Quality Assurance dalam pelaksanaan tugas.
  - c) ruang konsultasi sebagai catalyst.
  - d) Memastikan tidak terjadi pelanggaran.
  - e) Melaksanakan diskusi dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
6. Strategi Tata Kelola Kepegawaian  
Bidang Pengawasan bekerja sama dengan bidang pembinaan untuk menegakkan disiplin.

### III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan

#### a. Bidang Anggaran

##### 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar Rp345.140.245.000 dengan realisasi per tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp207.313.874.052.

##### 2. Program Prioritas dan Rencana Strategis Tahun 2023

- a) Pembangunan lanjutan Lapas Kelas III Pagaralam.
- b) Pemenuhan sarpras penunjang kinerja kantor wilayah.
- c) Pembangunan Zona Integritas.
- d) Peningkatan penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas di Sumatera Selatan.
- e) Meningkatkan pelayanan AHU dan KI, serta terfasilitasinya produk hukum daerah pendaftaran dan PNBP pelayanan hukum, pelayanan yankomas, dan HAM.
- f) Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah.

##### 3. Target PNBP Tahun 2023

No	Jenis Layanan	Target PNBP (Rp)	Realisasi (Jan-Jun 2023)	
			Rp	%
1	Layanan Administrasi Hukum	12.000.000.000	7.104.650.000	59,21
2	Layanan Kekayaan Intelektual	1.755.579.000	935.950.000	53,31
3	Layanan Keimigrasian	10.532.250.000	21.962.287.784	208,52
4	Layanan Pemasyarakatan	288.703.325	103.702.278	35,92
5	Layanan Dukungan Manajemen (Kanwil Setjen)	31.581.792	33.667.202	106,60
<b>Total</b>		<b>24.608.114.117</b>	<b>30.140.257.264</b>	<b>122,48</b>

##### 4. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp315.292.061.000.

##### 5. Target PNBP Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Target PNBP (Rp)
1	Layanan Administrasi Hukum	13.200.000.000

2	Layanan Kekayaan Intelektual	1.843.358.000
3	Layanan Keimigrasian	11.632.767.000
4	Layanan Pemasyarakatan	440.187.000
5	Layanan Dukungan Manajemen (Kanwil Setjen)	31.581.792
<b>Total</b>		<b>27.147.893.792</b>

## 6. Kebutuhan Anggaran

### a) Pemasyarakatan

- Pengadaan sarpras seluruh UPT Pemasyarakatan.
- ABT Belanja Daya Jasa Listrik sehubungan anggaran Belanja Modal Penambahan Daya Listrik pada beberapa UPT yang akan menambah biaya tagihan listrik.
- Penambahan anggaran pemindahan narapidana antarwilayah.

### b) Keimigrasian

Penambahan anggaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan terkait meningkatnya kasus TPPO di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp482.152.000.

### c) Pelayanan Hukum dan HAM

Penambahan anggaran penyelenggaraan kegiatan AKSI HAM, KKPHAM, P2HAM, dan penanganan dugaan pelanggaran ham di wilayah sebesar Rp77.265.000.

## b. Bidang Pengawasan

### 1. Kondisi Aktual Lapas/Rutan

Kapasitas hunian Lapas/Rutan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami overcapacity sebesar 137% atau sebanyak 15.624 WBP dari 6.605 WBP, yang terdiri atas 9.139 Narkotika, 6.281 Umum, dan 204 Korupsi.

### 2. Strategi Mengurangi Overcrowding pada Lapas/Rutan

- a) Optimalisasi implementasi Permenkumham Nomor 43/2021 dan Permenkumham Nomor 7/2022.
- b) Pemindahan narapidana ke Lapas di dalam dan di luar Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Mengusulkan pembangunan dan penambahan kapasitas hunian/gedung Lapas/Rutan baru di Provinsi Sumatera Selatan terutama pada daerah pemekaran kabupaten/kota.
- d) Peningkatan dan penguatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam mendorong terlaksananya Restorative Justice (RJ)/diversi dan penambahan jumlah UPT Bapas di Provinsi Sumatera Selatan.
- e) Menurunkan jumlah overstaying di Lapas/Rutan se-Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Upaya Pencegahan Penyelundupan Barang ilegal dan Peningkatan Fasilitas Sarpras Sanitasi

- a) Pelaksanaan sidak dan penggeledahan secara berkala dan insidental.
- b) Penguatan fungsi Petugas Pintu Utama (P2U).
- c) Pelaksanaan sidak dan tes urine secara berkala.
- d) Meningkatkan sinergitas dengan APH.
- e) Sosialisasi kepada WB, keluarga, dan pengunjung.
- f) Pemindahan narapidana highrisk.



- g) Meningkatkan dan pemeliharaan sarpras keamanan.
  - h) Penambahan jumlah petugas medis dan paramedis di Lapas/Rutan.
  - i) Mendorong Dapur dan Klinik Lapas/Rutan memperoleh sertifikasi.
  - j) Kerja sama dengan PDAM untuk penyediaan layanan air bersih.
4. Strategi Peningkatan Kecepatan dan Kualitas Layanan Publik
    - a) Membentuk Unit Kerja Kantor (Ukk) Imigrasi dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
    - b) Inovasi layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI dan Kelas II.
    - c) Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
    - d) Inovasi layanan AHU dan KI.

#### **IV. Penjelasan Kepala Pengadilan Tinggi Palembang**

##### **a. Bidang Anggaran**

###### **1. Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Realisasi anggaran per semester I tahun 2023 untuk DIPA 01 BUA MA RI adalah sebesar 55,16% dan DIPA 03 Dirjen Badilum sebesar 41,21%.

###### **2. Pagu Anggaran Tahun 2024**

Pagu anggaran tahun 2024 untuk DIPA 01 BUA MA RI adalah sebesar Rp25.659.764.000 dan DIPA 03 Dirjen Badilum sebesar Rp229.500.000.

###### **3. Program Prioritas**

- a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan output Percepatan Penyelesaian Perkara yang memerlukan anggaran untuk peningkatan manajemen peradilan umum berupa pembinaan administrasi teknis di tingkat banding.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan output Layanan Umum dan Layanan Perkantoran sebagai pendukung dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Anggaran yang diperlukan untuk pemenuhan sarpras kantor berupa peralatan TI dan renovasi gedung serta bangunan kantor.

##### **b. Bidang Pengawasan**

###### **1. Perkara yang Menonjol**

Perkara yang menonjol adalah perkara pidana Narkotika dan perkara tindak pidana ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan oleh anak di bawah umur.

###### **2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi**

- a) Aspek Teknis: Objek eksekusi tidak jelas/kabur (letak dan luas), peralihan objek ke pihak lain, dan terbitnya sertifikat baru.
- b) Aspek Yuridis: Pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan perlawanan atas berbagai alasan, perlawanan oleh pihak ketiga, putusan pengadilan yang tidak mengandung amar comdemnatoir, dan sifat pasif pengadilan jika Pemohon belum memenuhi kewajibannya maka eksekusi tertunda.

## V. Penjelasan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Palembang

### a. Bidang Anggaran

#### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran per semester I tahun 2023 untuk DIPA 01 BUA MA RI adalah sebesar Rp67.578.122.112 atau sebesar 49,55% dan DIPA 04 Dirjen Badilag sebesar Rp931.380.201 atau sebesar 51,90%.

#### 2. Kebutuhan Anggaran

- a) Pengadaan mobil dinas baru untuk 4 satuan kerja.
- b) Pengadaan genset untuk 7 satuan kerja.
- c) Kelengkapan sarpras pada 6 satuan kerja.

#### 3. Rencana dan Sasaran Strategis

Secara bersama telah berkomitmen dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

### b. Bidang Pengawasan

#### 1. Perkara Tahun 2023

Perkara yang masuk selama semester I tahun 2023 adalah sebanyak 8.120 perkara dengan perkara putus sebanyak 6.871 perkara atau sebesar 84,62% dan sisa perkara 1.249 perkara.

#### 2. Perkara yang Menonjol

No	Jenis Perkara	Total Perkara
1	Cerai Gugat	1.616
2	Cerai Talak	5.663
3	Isbat Nikah	779
4	Dispensasi Kawin	662

#### 3. Perkara yang Belum Dieksekusi

Terdapat 3 perkara yang belum dieksekusi karena sedang dalam proses upaya hukum Kasasi/Peninjauan Kembali (PK) dan dalam proses pengajuan lelang ke KPKNL.

## VI. Penjelasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

### a. Bidang Anggaran

#### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran per semester I tahun 2023 untuk DIPA 01 BUA MA RI adalah sebesar Rp41.257.193.000 dan DIPA 05 Badilmiltun sebesar Rp43.518.820.

#### 2. Kebutuhan Anggaran

- a) Sarpras pelayanan publik (sidang Pilkada) sebesar Rp1.342.332.000.
- b) Rumah dinas Pimpinan Pengadilan Tinggi TUN Palembang.

- c) Kendaraan dinas R4 bermuatan 12 orang sebesar Rp549.370.000.
- d) Uang makan dan uang lembur Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Persidangan Pilkada sebesar Rp30.436.000.

3. Rencana dan Sasaran Strategis

Secara bersama telah berkomitmen dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

b. Bidang Pengawasan

1. Data Perkara Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara Belum Diputus	BHT
1	Pengadilan TUN Palembang	47	33	14	77
2	Pengadilan TUN Lampung	20	15	5	18
3	Pengadilan TUN Bengkulu	18	17	1	7
4	Pengadilan TUN Jambi	10	10	0	13
5	Pengadilan TUN Pangkal Pinang	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>115</b>

2. Perkara yang Menonjol

Perkara yang menonjol adalah perkara kepala desa sebanyak 47 perkara dan perkara pertanahan sebanyak 29 perkara.

3. Data Perkara Eksekusi Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Permohonan Eksekusi	Dalam Proses Eksekusi	Telah Dieksekusi	Hambatan
1	Pengadilan TUN Palembang	40	25	15	Pemohon dan Termohon tidak menginformasikan perkembangan kepada Pengawas Eksekusi.
2	Pengadilan TUN Lampung	18	10	8	Pelaksanaan eksekusi ada keterkaitan dengan instansi lain.
3	Pengadilan TUN Bengkulu	7	7	0	Terjadi perubahan keadaan atas jabatan yang dimohonkan eksekusi.
4	Pengadilan TUN Jambi	13	2	11	
5	Pengadilan TUN Pangkal Pinang	1	0	1	
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	

**VII. Penjelasan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang**

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 BUA MA RI adalah sebesar 62% dan DIPA 05 Badilmiltun sebesar 58,63%.

2. Kebutuhan Anggaran

- a) ABT untuk peningkatan pelayanan (gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kerja, ruang kerja, ruang arsip, serta ruang pelayanan).
- b) Penambahan sarpras (gedung kantor, kendaraan dinas, dan rumah dinas) dan penambahan personel.

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara Tahun 2023

Perkara	Beban PKR	Putus	Sisa
Lalin	5	5	0
Pidana	87	76	11

2. Perkara yang Menonjol

Perkara yang menonjol adalah perkara kepala desa sebanyak 47 perkara dan perkara pertanahan sebanyak 29 perkara.

### VIII. Penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

a. Bidang Anggaran

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp32.691.559.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.591.220.131 atau sebesar 59,93%.

2. Pagu Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran indikatif tahun 2024 sebesar Rp32.489.653.500.

3. Target PNBPN Tahun 2024

Target PNBPN tahun 2024 sebesar Rp787.640.000 dan 3.395 orang.

4. Program Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Program Prioritas Nasional	Target	Anggaran (Rp)
1	Ketahanan Diri Remaja	3 lembaga dan 90 orang	937.000.000
2	Desa Bersih Narkoba	21 desa	633.000.000
3	Ketahanan Diri Keluarga	50 keluarga	400.000.000
4	Pemberdayaan Alternatif	1 kelompok masyarakat	166.410.000
5	Advokasi Kota Tanggap Ancaman Narkoba	20 instansi	1.952.427.000
6	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat	20 unit	177.210.000
7	Lembaga Rehabilitasi Narkotika SNI 8807:2022	2 lembaga	BNN RI

a) Bidang Pencegahan

No	Kegiatan Prioritas	Target	Anggaran (Rp)
1	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti-Narkoba	50 keluarga	400.000.000
2	Fasilitasi, Asistensi, dan Monev Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti-Narkoba	21 desa	633.000.000

	Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa		
3	Pelatihan <i>Softskill</i> di SMP dan SMU Sederajat	3 sekolah	84.945.000
4	Dialog Interaktif Remaja	90 orang	258.910.000
5	Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi	3 lembaga dan 90 orang	592.245.000

b) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan Prioritas	Target	Anggaran (Rp)
1	Rapat Koordiansi Pengembangan dan Pembinaan Kotan	20 lembaga	252.810.000
2	Bimtek Penggiat P4GN		862.953.340
3	Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba melalui Tes Urine		237.429.000
4	Asistensi Kotan		43.385.000
5	Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kotan		34.365.000
6	Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba	1 kelompok masyarakat	3.600.000
7	Rapat Kerja dalam rangka Pemberdayaan Alternatif		18.120.000
8	Audiensi dengan Stakeholder		5.250.000
9	Bimbingan Teknis Lfeskill Kawasan Rawan Narkoba		121.090.000
10	Bimbingan Teknis Stakeholder dan Pendamping di Kawasan Rawan Narkoba		13.850.000

c) Bidang Rehabilitasi

No	Kegiatan Prioritas	Target	Anggaran (Rp)
1	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	415 orang	281.505.000
2	Layanan PascaRehabilitasi	100 orang	77.977.000
3	Petugas Rehabilitasi Terlatih	25 orang	140.485.000
4	Petugas Rehabilitasi Tersertifikasi	8 orang	56.135.000
5	Layanan SKHPN PNBPN	4.900 orang	1.136.800.000
6	Layanan Evaluasi Psikologi A	5 orang	1.000.000
7	Layanan Evaluasi Psikologi B	5 orang	1.400.000
8	Lembaga Rehabilitasi SNI 8807:2022	3 lembaga	32.248.000
9	Pelatihan Petugas Agen Pemulihan	100 orang	

d) Bidang Pemberantasan

No	Kegiatan Prioritas	Target	Anggaran (Rp)
1	Pemetaan Informasi Jaringan Intelijen	2 laporan	100.000.000
2	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	20 berkas	1.050.000.000
3	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 berkas	210.000.000

b. Bidang Pengawasan

1. Pengungkapan Kasus dan Jaringan Narkotika

BNNP Sumatera Selatan telah berhasil mengungkap 23 kasus Narkotika dengan tersangka sebanyak 30 orang dan 5 jaringan Narkotika yang terdiri atas 2 jaringan Narkotika internasional dan 3 jaringan Narkotika nasional.

2. Barang Bukti

No	Barang Bukti	Jumlah
1	Sabu	137,491 kg
2	Ekstasi	46 butir
3	Ganja	8,1 kg
4	Tembakau Gorilla	18 gram

a) Barang Bukti Jaringan Internasional

- Jaringan Myanmar – Malaysia – Pekanbaru – Sumatera Selatan: 115 kg sabu
- Jaringan Malaysia – Pekanbaru – Palembang: 20 kg sabu

b) Barang Bukti Jaringan Nasional

- Jaringan Pali – Muba: 300 gram sabu
- Jaringan OKI: 2 kg sabu
- Jaringan Medan – Palembang – OKU – Lampung – Jakarta: 8 kg ganja

3. Jalur Peredaran Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan

a) Jalur Darat

Peredaran Narkotika dengan jenis sabu, ganja, dan ekstasi melalui jalur Trans-Sumatera dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Sumatera Selatan, yaitu:

- Musi Banyuasin – Pali – Muara Enim
- Muratara – Lubuk Linggau – Musi Rawas
- Pekanbaru – Jambi – Palembang – OKU Raya
- Pekanbaru – Jambi – OKI
- Pekanbaru – Jambi – Palembang

b) Jalur Udara

Pengiriman Narkotika dalam bentuk paket di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan melalui jasa ekspedisi paket pengiriman barang.

c) Jalur Perairan

Pengiriman dari Aceh, Pekanbaru, Batam, masuk ke Selat Bangka menuju:

- Sungsang – Banyuasin
- Sungai Musi – Sungai Ogan – Desa Sungai Ceper
- Sungai Musi – Sungai Komering – Desa Tulung Selapan

4. Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan
  - a) Jalur Darat

Bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan, Dishub Sumatera Selatan, dan PT Waskita Karya (operator jalan tol) untuk kegiatan razia kendaraan masuk-keluar Sumatera Selatan di pintu-pintu tol dan Terminal Alang-Alang Lebar.
  - b) Jalur Udara

Bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II dan Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan kargo dan barang bawaan penumpang.
  - c) Jalur Perairan
    - Patroli laut bersama Kanwil Bea Cukai, Polair, dan TNI AL
    - Razia penumpang di Pelabuhan Boom Baru (Pelabuhan Jet Poil) dan Pelabuhan Tanjung Api-Api (penumpang dari Bangka Belitung)
    - Bekerja sama dengan Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan kargo masuk-keluar Pelabuhan Boom Baru.
5. Capaian Pengungkapan Kasus TPPU
  - a) Jumlah Aset TPPU selama tahun 2017-2021 yang telah disita (P21) senilai Rp9,3 miliar atas 5 kasus dengan 6 tersangka dengan rincian:
    - Rumah atau tanah senilai Rp4,5 miliar
    - Uang senilai Rp1,4 miliar
    - Kapal senilai Rp800 juta
    - Kendaraan mobil senilai Rp2,1 miliar
    - Kendaraan motor senilai Rp205 juta
    - Perhiasan senilai Rp350 juta
  - b) Jumlah Aset TPPU selama tahun 2022-2023 yang telah disita (Penyidikan) senilai Rp1,7 miliar atas 2 kasus dengan 2 tersangka dengan rincian:
    - Rumah atau tanah senilai Rp1 miliar
    - Uang senilai Rp170 juta
    - Kendaraan mobil senilai Rp530 juta
6. Capaian Pelaksanaan Assessment Pengguna Narkoba
  - a) Jumlah orang yang direhabilitasi selama Januari-Juli 2023 sebanyak 523 orang, 360 orang RJ dan 163 orang RI.
  - b) Jumlah permohonan TAT dari 523 orang sebanyak 17 permohonan dengan jumlah tersangka 25 orang dan 8 orang tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi.
  - c) Bagi orang yang tidak direkomendasikan untuk direhabilitasi, proses dilanjutkan ke JPU karena berkaitan dengan jaringan.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi dan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan oleh Para Mitra Kerja Komisi III di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penindakan atas illegal things di Provinsi Sumatera Selatan dan meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk semakin meningkatkan pengungkapan dan pemberantasan kegiatan illegal things yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas upaya pencegahan dan penanganan perkara yang telah dilakukan, serta penerapan Restorative Justice (RJ) Provinsi Sumatera Selatan.
4. Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menindak tegas kasus mafia pertanahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan over-kapasitas WBP Lapas/Rutan dan permasalahan TPPO di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Komisi III DPR RI mengapresiasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Narkotika yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait lainnya, serta pelaksanaan pencegahan penggunaan Narkotika dan program rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses  
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.**  
**A-77**